

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Pemerintah daerah di Indonesia merupakan lembaga yang masih tinggi tingkat korupsinya sehingga menyebabkan kinerja pemerintah dalam melayani publik menurun dan menimbulkan kerugian karena pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh audit internal pemerintah, penegakan hukum, dan opini audit terhadap tingkat korupsi.

Setelah dilakukan serangkaian proses penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis, pada variabel Audit Internal Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya audit internal pemerintah memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Audit internal pemerintah dapat menjadi langkah yang efektif dalam mengurangi tingkat korupsi di lingkup pemerintah daerah.

Penegakan hukum sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa adanya penegakan hukum memberikan pengaruh yang efektif pada tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Temuan itu dapat disebabkan karena penegakan hukum merupakan langkah yang efektif dalam mengawasi kinerja pengelola dalam mewujudkan kepentingan publik. Keadaan sistem hukum yang kuat dapat memberikan efek menguntungkan dalam mengurangi persepsi korupsi.

Pada variabel terakhir yaitu opini audit setelah dilakukan pengujian hasilnya juga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa adanya opini audit memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah di Indonesia. Temuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki persepsi korupsi yang lebih rendah jika memperoleh opini yang baik.

V.2 Saran

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat korupsi di Indonesia dengan menggunakan data yang menyatakan bahwa kasus korupsi tersebut benar benar terjadi pada tahun 2020 atau mengambil data lebih dari satu tahun, peneliti juga dapat menambahkan pengaruh faktor politik, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan faktor lainnya pada penelitian selanjutnya lalu peneliti dapat menggunakan data primer seperti wawancara dan kuisioner.

b) Pemerintah

Penelitian ini mengharapkan pemerintah pusat dapat lebih mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dimana perlu peraturan yang tegas agar kebijakan tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Selain itu, sebaiknya pemerintah dapat semakin meningkatkan pengawasan serta pengendalian internalnya agar tidak terjadi kesalahan bahkan kecurangan pada penyajian laporan keuangan contohnya adalah dalam proses pemeriksaan dan pemberian opini, sehingga dapat mencegah dan mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah di Indonesia.

c) Lembaga Hukum

Penelitian ini mengharapkan lembaga hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional melakukan perbaikan kualitas kelembagaannya secara menyeluruh dengan memperkuat supremasi hukum, peningkatan kualitas undang-undang dan memperbanyak jumlah lembaga hukum yang dapat menindaklanjuti tindak pidana korupsi di setiap pemerintah daerah Indonesia.